

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BUMDES PADA
DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN
SEMENDE DARAT TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH:

YOGA PRANATA

NIM:196311163

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

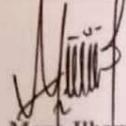
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpedapat bahwa skripsi saudara Yoga Pranata Prodi Perbankan Syariah mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BUMDes PADA DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 23 Nopember 023

Pembimbing I



Mega Ilhamiwati, M.A
NIP. 19861024 201903 2 007

Pembimbing II



Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E
NIDN. 2019059105

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoga Pranata
Nomor Induk Mahasiswa : 19631115
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2023

Peneliti



Yoga Pranata
Nim. 19631115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/Facebook: FakultasSyariahdanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 557 /In.34/FS/PP.00.9/19/2023

Nama : **Yoga Pranata**
Nim : **19631115**
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Akuntabilitas dan Transparansi BUMDes pada Desa Tanjung
Raya Kecamatan Semende Darat Tengah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

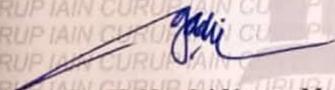
Hari/ Tanggal : **Selasa, 28 November 2023**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, 2023

Ketua

Sekretaris

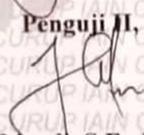

Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag
NIP. 19690602 199503 1 001


Sidiq Aulia, M.HI
NIP : 19880412 202012 1 004

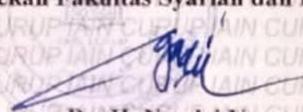
Penguji I,

Penguji II,


Bahman Arifin, ME
NIP. 19881221 201903 1 009


Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag
NIP. 19690602 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil Aalamiin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang mahakuasa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga mampu untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi.

Allahumma Sholli ala Sayyidana Muhammad, shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda *Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam*. Sang revolutioner, sang pemimpin, sang pencerah bagi umat islam. Penulis menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis sangat terbatas namun, dengan adanya bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, kepada semua yang tercinta dan tersayang:

1. Ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moral maupun materi selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
3. Wakil Rektor I Bapak Dr. Yusefri, M.Ag
4. Wakil Rektor II Dr. Muhammad Istan,SE., M.Pd., M.M
5. Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Nelson, S.Ag.,M.Pd.I
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M. Ag
7. Khairul Umam Khudhori, M.E.I, Ketua Prodi Perbankan Syariah.

8. Mega Ilhamiwati, M.A, selaku pembimbing I dan Sineba Arli Silvia, S.E.I.,M.E, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.
9. Andriko, M.E.Sy, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada peneliti.
10. Segenap dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya Karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan peneliti.
11. Para keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan disisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya. *Aamiin Ya Rabbal ,,Alamiin.*

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Desember 2023

Peneliti

Yoga Pranata

Nim: 19631115

MOTTO

**Jangan Pernah Berprasangka Buruk Kepada Allah Bisa Jadi Di Balik
Kesulitanmu Ada Kebahagiaan Yang Besar Menantimu**

Yoga Pranata, 21 - 02 - 2000

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. karyaku ini aku persembahkan untuk orang terkasih.

1. Teristimewa untuk orang yang paling aku cintai dan aku sayangi yaitu kedua orang tua ku. Pertama ucapan ribuan terima kasih untuk ibu ku tercinta (Maita) yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Ucapan terima kasih juga teruntuk bapak tercinta dan tangguh (Zikri). Ucapan terima kasih rasanya masih belum cukup atas semua yang bapak dan ibu lakukan, yang telah membersarkanku dengan penuh kasih sayang yang tak akan mungkin aku dapatkan dari siapapun. I Love You So Much, terima kasih untuk semua do'a yang paling istimewa yang selalu engkau langitkan untukku dengan penuh kasih sayang, sehingga aku dapat menyelesaikan semua urusanku dengan baik, jasa yang tak terbalaskan dengan kebaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak
2. Spesial untuk Ibu Mega Ilhamwatil, M.A dan Ibu Sineba Arli Silvia, S.E.I M.E.Terima kasih atas bimbingan, dukungan serta semangat yang selalu di berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk adikku (Nuzul Padli, Robi Triayajasa, Tasya Raha Yuni), dan juga my support system (Nasirah) terimah kasih untuk semua support, dukungan, bantuan dan do'a yang selalu kalian berikan untuk kelancaran semua ini.
4. Untuk keluarga besar Ayah dan Ibuku, terima kasih atas dukungan, bantuan,semangat dan do'a untuk kelancaran semua ini.

5. Untuk Bapak Efrizal, Bapak Lukman dan juga Ibu Sasnila selaku Komisaris, Ketua, dan Bendahara BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya, serta pihak lainnya. Terima kasih atas kerja sama yang baik dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
6. Untuk sahabat seperjuanganku (Pirzan, Trio Imam Muchlisin , Rizki Anugerah, Yosan Abella, Heni Alfionita, Sulis Julianti, Anggun Lestari dan Selvi Rizki Viona), terimah kasih untuk support yang selalu kalian berikan dan menjadi keluarga kedua.
7. Untuk sahabatku (Are Bagaskara, Apriansyah Putra, Zikri) terimakasih atas dukungan dan dan doa yang telah kalian berikan atas kelancaran skripsi ini.
8. PERSADE (PS Lokal D) terima kasih kalian telah memberikan waktu untuk mengenal dan teima kasih juga atasdukungannya selama ini.
9. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah yang selalu menjadi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya.
10. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan

ABSTRAK

Yoga Pranata (19631115) : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BUMDES PADA DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH

Akuntabilitas adalah bertanggung jawab, transparansi yaitu keterbukaan tentang informasi keuangan yang ada pada pengelola BUMDes Desa Tanjung Raya kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan di BUMDes Desa Tanjung Raya ini menguraikan mengenai akuntabilitas laporan keuangan yang ada di BUMDes Desa Tanjung Raya dan Transparansi pengelolaan laporan keuangan terhadap pengelolaan aset pada Badan Usaha Milik Desa dalam persepektif islam

Penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dan jenis penelitiannya Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa pihak pengelola BUMDes sudah berjalan berdasarkan beberapa dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial sehingga manajemen pengelolaan sudah baik dan aset-aset yang ada pada Desa Tanjung Raya akan dapat ditingkatkan dan berpotensi untuk menambah penghasilan BUMDes Serasan, dan juga pada pertanggungjawaban laporan keuangan pihak pengelola sudah dilakukan dengan baik dan dikerjakan oleh ahli dalam bidang keuangan. Sedangkan transparansi yang dilakukan pengelola BUMDes tergolong kurang transparan dimana dapat dilihat dari temuan peneliti pada BUMDes Serasan pihak pengelola hanya menyampaikan informasi keuangan kepada perwakilan saja dan memiliki kriteria tertentu yaitu RT dan Perangkat Desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, BUMDes*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HAL PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Literatur	8
F. Penjelasan Judul	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Akuntabilitas	18
B. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam	20
C. Tipe Akuntabilitas	23
D. Dimensi Akuntabilitas.....	25
E. Pentingnya Akuntabilitas	27
F. Transparansi	28
G. Transparansi Dalam Persepektif Islam.....	31
H. Indikator Transparansi	33
I. Karakteristik Transparansi	35
J. Prinsip-Prinsip Transparansi	36
K. BUMDes	37
BAB III GAMBARAN UMUM	39
A. Sejarah Berdirinya BUMDes Tanjung Raya.....	39
B. Tujuan Berdirinya BUMDES Desa Tanjung Raya	40
C. Program-Program BUMDes Desa Tanjung Raya	42
D. Visi Misi BUMDes Desa Tanjung Raya	42
E. Landasan hukum bumdes	43

F.	Struktur Bumdes Desa Tanjung Raya	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		47
A.	Hasil Penelitian	47
B.	Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN.....		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	73
----------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar3.1.....48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksanannya tata kelola pemerintahan desa yang baik.¹

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin dan tradisional. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang

¹ Lina Nasehatun Naffidah, Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang*, “*Jurnal Ilmu Akuntansi*”, Vol, 10, No, 2, 2017. h. 3.
Doi: 10.15408/Akt.V10i2.5936

pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa.²

BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian bersar merupakan kekayaan desa. Pada akhirnya BUMDes dibentuk untuk tujuan memperoleh dan memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.³ Adapun secara sosiologis, tersedianya suatu lembaga ekonomi yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa sudah berjalan dengan kepentingan bersama masyarakat, kehadiran lembaga semacam ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreativitas masyarakat desa untuk mengusahakan kesejahteraannya. Secara yuridis peraturan di daerah tentang BUMDes berdasar pada UU No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”⁴ Suatu

² Suci Indah Hanifah,, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*, “*Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*”, Vol, 4, No. 4 (2015). h. 2. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3584>.

³ Amelia Sri Kusuma, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, “*Journal Of Rural And Development*”, Vol, 5, No. 1 (2014). h. 5.

⁴ Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”, *Fiat Justitia JurnaR Ilmu Hukum*, Vol 7, No, 3, 2013. h. 2. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>

organisasi yang baik tidak hanya memiliki system pengendalian internal yang menunjang, namun juga memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan ataupun kegagalan organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan, dengan media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala. Akuntabilitas keuangan pemerintah desa merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan secara berkala. Keberhasilan atau kegagalan akuntabilitas keuangan atas tata kelola dana desa oleh pemerintah desa diukur dari kepatuhan dan ketaatan terhadap asas partisipatif, akuntabel, transparan, tertib, dan disiplin. Akuntabilitas keuangan secara vertikal dan horizontal yang berpedoman pada asas-asas tersebut, selain sebagai cerminan kepatuhan dan ketaatan pemerintah desa terhadap peraturan yang berlaku juga memperlancar penyaluran dana dan meningkatkan kepercayaan rakyat, juga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa⁵

Transparansi merujuk kepada ketersediaan informasi kepada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan kepuasan pemerintah dengan indikator sebagai berikut: Akses pada informasi yang akurat, tepat waktu, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya,

⁵ Amrizal Imawan Et Al, *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik*, "Jurnal Akuntansi Multiparadigma", Vol 10, No 1, 2019. H 156.

kemudahan akses, dan informasi menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan juga sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparan dan responsivitas pemerintah lokal.⁶

Permendagri No. 113 tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan karena dengan adanya asas transparan atau aspek keterbukaan akan menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi atas penyelenggara pemerintahan yaitu informasi atas kebijakan pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa. Transparansi menjadi fungsi penting terkait pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil suatu keputusan penting yang berdampak bagi banyak pihak, pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dilakukannya.⁷

Kegiatan muamalah akan lebih baik jika pengelola badan usaha milik desa mencatat semua transaksi yang dilakukan dan bersikap transparan kepada masyarakat karena hal ini menyangkut kepentingan bersama. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'alah dalam QS. Surah-Albaqarah 2: Ayat (283) .

⁶ Norita Citra Yulianti and Dimas Dwi Oktavian, "*Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Karya Mandiri Pada Pelaporan Aset Desa*," (2021). h.134.

⁷ Eka Suci Setia Ningrum, Sigit Hermawan, "*Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDES dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes*," (2017). h. 65

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Mah Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Pengelolaan asset di BUMDes Desa Tanjung Raya dilakukan dengan cara membagi tugas untuk masing-masing unit usaha yang dijalankan dengan tujuan agar lebih memudahkan pekerjaan. Pengelolaan manajemen yang baik maka aset-aset yang berpotensi menambah sumber pendapatan bagi desa akan dapat dikembangkan. Melihat perkembangan teknologi dan informasi maka sudah sepantasnya pihak pengelola BUMDes menerapkan sistem informasi karena dengan adanya sistem informasi semua data akan dapat dikelola dengan baik yang mana akan memberikan dampak positif dalam pengambilan keputusan serta dapat mendukung terciptanya standar transparansi yang lebih baik. Selain itu agar kegiatan usaha yang dijalankan mendapatkan keberkahan dan keridhoan dari Allah maka hendaklah para pelaku usaha menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari (tauhid, keadilan, keseimbangan, akhlak dan

kebebasan individu) yang berlandaskan dalil syar'iyah yakni (Al-Quran, Assunah, Ijma, dan Qiyas).

Saat ini juga BUMDes di Desa Tanjung Raya sudah berkembang baik dari segi usaha dimana dari awal berdirinya BUMDes hanya memiliki dua usaha dan saat ini sudah berkembang ke berbagai usaha, sehingga proses pertanggungjawaban pelaporan keuangan juga harus dilakukan dengan baik agar dalam menjalankan usaha BUMDes dapat berkembang dan lebih berhasil kedepannya.

Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Akuntabilitas Dan Transparansi BUMDes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan BUMDes Desa Tanjung Raya ?
2. Bagaimana transparansi BUMDes pada Desa Tanjung Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tuliskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas BUMDes pada Desa Tanjung Raya.
2. Untuk mengetahui transparansi BUMDes pada Desa Tanjung Raya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan suatu manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti.

Penelitian ini di harapkan untuk dapat mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi BUMDes yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa tanjung raya

b. Bagi BUMDes

Penelitian ini diharapkan dapat mewadai dan membantu cara penyusunan laporan keuangan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat akan kinerja keuangan yang baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan pemahaman bagi peneliti menangani laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan kinerja keuangan BUMDes Desa Tanjung Raya.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam mengetahui akuntabilitas dan transparansi BUMDes pada desa Tanjung Raya.

E. Kajian Literatur

Ada beberapa jenis disertai yang menurut penulis unik dalam membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, antara lain:

1. Yuni Yuliana Burhan (105731115116), Skripsi, Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Dana Desa (Pada BUMDes Berkah Pa'lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar), Tahun 2020.

Permasalahan penelitian ini adalah lembaga sistem pengawasan yang dimiliki lembaga tersebut sehingga menimbulkan celah dan celah bagi pimpinan desa untuk melakukan manipulasi anggaran dan desa (ADD) secara curang. Dari 11 desa yang pemantauan, terdapat 10 desa yang di duga benar-benar menggunakan ADT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sumber penelitian ini adalah manajemen BUMDes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan dana desa adalah pada saat penyajian laporan akhir yang akan diserahkan pada pihak aparat desa, BPD, Inspektorat dan

masyarakat untuk melihat apakah data yang dilaporkan pada BUMDes sudah sesuai dengan pelaporan dana desa baik dari segi penyertaan modal untuk BUMDes ataupun setoran pendapatan asli desa yang diperoleh dari keuntungan pengelolaan BUMDes. BUMDes konsisten dengan laporan dana desa baik dari penyertaan modal pada BUMDes maupun setoran pendapatan desa yang berasal dari keuntungan pengelolaan BUMDes.

2. Nurma fitriana (1502100288), Skripsi, Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Rowowrejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Persepektif Good Corporate Governance, Tahun 2021

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya media atau forum bagi masyarakat khususnya untuk mengakses informasi 9 terkait dana BUMDes, laporan keuangan atau informasi lainya serta kurangnya pertemuan langsung antara manajemen dan informasi lain terkait Romorejo. masalah BUMDes. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, walaupun sifat penelitiannya deskriptif. Namun sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan catat. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis lapangan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan berpikir induktif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa prinsip transparansi pengelolaan keuangan BUMDes Roorejo adalah transparansi pengelolaan dana BUMDes unggul makmur di Desa Roorejo masih belum maksimal, karena tidak adanya aksebilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang BUMDes Unggul Makmur pengelolaan keuangan

3. **.Pardi dan Budi Istiyanto, Artikel, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Sebagai Penguatan Badan Usaha Milik Desa, Edunomika, Vol 04, No02, Tahun 2020. <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie/article/view/1272>**

Permasalahan penelitian ini menunjukan bahwa kapasitas manusia dan sumber daya keungan telah meberikan manfaat bagi desa sesuai dengan tujuan Bumdes Namun Pembagian Pendapatan kontribusi terhadap pendapatan awal desa kurang sesuai dengan 27 AD/Art. Penelitian ini merupakan jenis peneltian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan ekonomi terkait BUMDes. Data penelitian ini berupa kutipan dan rekaman audio wawancara.

4. **Surfina, Artikel, Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Fenomena Pada BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung Raya Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten KapuasHulu, Kalimantan Barat, 2021. <https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wpcontent/uploads/2022/05/40.pdf>**

Permasalahan penelitian ini adalah keberadaan BUMDes di desa ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan melakukan pengelolaan keuangan desa untuk mengelola potensi kemandiriandes dengan berbagai jenis kegiatan perekonomian, namun masih ada 18 faktor yang menyebabkan kontribusi tersebut belum terlaksana dengan baik di desa-desa yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga air bersih agar masyarakat dapat menggunakannya di kemudian hari dan memiliki kesehatan yang baik kualitas kebaikan air brsih bagi lingkungan bahkan dapat menciptakan lapanga kerja bagi masyarakat, penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan study kasus, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan penelitian dokumen.

F. Penjelasan Judul

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari kata asing “*Accountability*” yang berarti tanggungjawab. Selain itu, secara umum tanggung jawab adalah suatu bentuk tanggungjawab hukum seorang atau perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan seperti pelaporan, administrasi, dan akuntansi.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparan yang berart jelas, realistis dan terbuka. Istilah transparansi dapat di pahami sebagai kejelasan dan keterbukaan informasi. Transparansi adalah kebebasan akses terhadap aktivitas politik dan ekonomi serta keputusan pemerintah. Transparansi memungkinkan seluruh pemangku kepentingan melihat struktur dan fungsi pemerintah, tujuan kebijakan dan proyeksi anggaran, serta pelaporan (akuntabilitas) periode

⁸ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, (UMPRess 2020), h.4

sebelumnya.⁹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan suatu organisasi terhadap pemangku kepentingan.

3. BUMDes

Perlu kita ketahui bahwa Badan Usaha Desa atau biasa disebut BUMDes merupakan suatu badan yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa, baik dari segi penciptaan, permodalan, pelaksanaan dan manfaat yang di peroleh melalui perlindungan desa.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengamati dan mengumpulkan data dari subjek yang memberikan informasi secara lengkap.¹¹ Pendekatan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif metode analisis deskriptif merupakan metode analisis yang menggambarkan status peristiwa dan karakteristik yang diamati secara aktual, autentik, dan akurat.¹² Sedangkan metode penelitian kualitatif

⁹ Dedy Aries Poae David P. E Saerang, "Pengaruh laporan penyajian keuangan Daerah dan akuntabilitasnya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah di pemerintahan kabupaten kepulauan talaud", *Jurnal Accountability*, Vol 2, No 1, (2023). H. 30
DOI:10.32400/ja.2340.2.1.2013.27-35

¹⁰ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta : Mitra Wacana Media), 2016, h. 2.

¹¹ Sukarman Syarnubi, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (STAIN: Curup: Lembaga Penerbitan Dan Percetakan (LP2), 2011, h. 112.

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.20.

adalah metode penelitian sebagai suatu pendekatan atau penyelidikan untuk menggali dan memahami suatu gejala pokok. Untuk memahami gejala utama tersebut. Peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang cukup luas dan umum. Informasi yang disampaikan peserta kemudian dikumpulkan, yang biasanya berupa kata-kata atau teks, dokumen, cerita dan lain-lain..¹³

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah BUMDes Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat tengah pada hari rabu 20 Juli 2023

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didukung oleh data sekunder. Data penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder sebagai berikut:¹⁴

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpul data langsung mengenai topik yang menjadi sumber informasi yang dicari¹⁵

Sumber data primer yaitu:

- 1). Hasil wawancara dari pengelola BUMDes Desa Tanjung Raya

¹³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 133

¹⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian sosial dan ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013). Hal 128

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data dalam studi pustaka.¹⁶ Data sekunder diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BUMDes, baik berupa buku, majalah artikel, peraturan hokum atau kebijakan pemerintah dan lain-lain yang semuanya dapat mendukung penelitian ini.

Sumber data sekunder yaitu:

- 1). Dokumentasi pada saat wawancara, buku tabungan BUMDes Serasan serta data hasil pendapatan BUMDes Serasan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan buku untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dari lokasi penelitian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sesi Tanya jawab tatap muka anatara dua orang atau lebih.¹⁷ Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dengan pertanyaan bebas tetapi sesuai dengan data yang

¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 77.

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitin Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara 2001), h. 55.

ingin diketahui, menyiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan topic yang dibahas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau catatan peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk tulisan, pidato, surat kabar, majalah dan karya ilmiah. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian. Data ini diperoleh dari BUMDes Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah serta berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya untuk menemukan dan menyusun secara sistematis catatan-catatan dari observasi, wawancara dan lain-lain. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam bentuk kesimpulan kepada orang lain.¹⁸ Ada tiga hal yang penting dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data umum yang muncul dari

¹⁸ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin, 2018), h. 84

catatan lapangan tertulis. Proses ini berlanjut sepanjang proses penelitian bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan.¹⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan menyusun kumpulan informasi, menciptakan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaring-jaring dan diagram. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang disusun secara koheren dan mudah diikuti. Memungkinkan anda melihat lebih jelas apa yang terjadi. Apakah kesimpulannya benar atau salah, dan mengalisisnya kembali.²⁰

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya menarik kesimpulan terus dilakukan oleh peneliti di bidang ini. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari objek, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), penjelasan, alur cerita, sebab akibat, serta klausa. Kesimpulan-kesimpulan ini diperlakukan secara samar-samar dan tetap terbuka. Awalnya tidak jelas, namun kemudian menjadi lebih detail dan jelas.²¹

¹⁹ Albi Aggito Dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak 2018), h. 89

²⁰ Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian*, (Sulsel: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary 2020), h. 78

²¹ Nurlena Andalia et al, *Metodologi Penelitian*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi 2022. h. 129

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntabilitas

Kata akuntabilitas seperti termuat dalam *oxford english dictionary*, mengandung pengertian kualitas menjadi bertanggung jawab, kewajiban memberi penjelasan dan menjawab, melaksanakan kewajiban atau tindakan, tanggung jawab, pertanggung jawaban. *Accountablenes* artinya kualitas atau fakta menjadi bertanggung jawab atau berkewajiban memberi penjelasan dan jawaban atas tindakan tanggung jawab, pertanggung jawaban pada seseorang atau sesuatu hal.¹

Akuntabilitas adalah landasan seluruh proses pemerintahan, dan efektivitas proses tersebut bergantung pada bagaimana pihak yang berkuasa menjelaskan bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawabnya, baik secara konstitusional maupun yuridis. Akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan efisiensi, efektivitas, integritas dan kecerdasan pada tingkat tertinggi.²

Akuntabilitas publik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh suatu agen kepada orangnya atau bentuk yang memerlukan pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini ditetapkan sebagai bentuk transparansi dalam operasional perusahaan.

¹ Manggaukang Raba, "*Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*", Malang :UMMPres 2020, h. 9

² Hari Susanto, Syaifud Fadhillah, *Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo*, "*Jurnal Ilmiah*", Vol, 18, No, 1, 2022. h. 8. <https://doi.org/10.36841/acton.v18i1.1843>

Akuntabilitas public juga dapat dipahami sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggara suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.³

Pengertian akuntabilitas menurut para ahli :

Mardiasmo mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang 17 perwakilan (*agent*) untuk memberikan mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi dana perwakilan (*principal*) yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk menuntut, pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui medie akuntabilitas yang dilakukan secara berkala.⁴

Menurut Adisasmita, akauntabilitas adalah alat yang memepertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok, fungsi, dan misi suatu organisasi. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat kita simpulkan bahawa akuntabilitas adalah suatu bentuk pemenuhan kewajiban

³ Chintia Ayu Tamara, Yunus Tete Konde, *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan*, "Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman", Vol, 1, No, 1, 2016. h. 7. <https://doi.org/10.29264/jiam.v1i1.181>

⁴ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2018). h. 56

pribadi atau kolektif terhadap unit organisasi atas setiap kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditentukan.⁵

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab itu sendiri mengandung makna kewajiban menurut hukum untuk melayani atau membantu pengamat independen yang berhak melaporkan temuan atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kegiatan. Dengan kata lain akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah mengamanatkan perlunya menyajikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, agar masyarakat dapat mengetahui pertanggungjawabannya.⁶

B. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas adalah tanggungjawab seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dipercayakan kepada manusia adalah amanah dan setiap manusia wajib mempertanggungjawabkannya.⁷

Menurut Lewis dari Kiswanto, tanggungjawab adalah inti islam (di jantung islam). Padahal konsep akuntabilitas dalam islam mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan konsep akuntabilitas alam akuntansi.

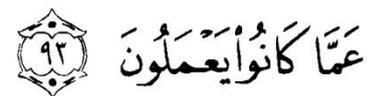
⁵ Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Pamekasan: Graha Ilmu 2014), h. 45

⁶ Mikael Edowai dan Herminawaty Abubakar Miah Said, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida), 2021, h. 16-18

⁷ Atep Hendang Waluya, *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS Al Baqarah (2) : 282-284*, "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah", Vol, 12, No, 2, 2020. h. 23.
<https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>

Konsep tanggungjawab dalam islam tidak hanya tanggungjawab pada pihak-pihak yang terlibat tetapi juga terhadap Allah dan masyarakat. Memang benar bahwa hokum islam, yang berdasarkan pada syariah (etika global), mengatur secara lebih spesifik bagaimana bisnis dirancang, bagaimana bisnis diatur, dan dikelola, dan bagaimana laporan keuangan disusun.⁸

Dalam ilmu akuntansi kita mengenal istilah “tanggungjawab”, sebenarnya istilah ini erat kaitannya dengan sebuah ayat dalam al-qur’an yang berumur 1400 tahun. Tanggungjawab sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pada hakekatnya diingatkan dalam al-qur’an bahwa tanggungjawab tertinggi ada ditangan Allah. Tanggungjawab yang dijelaskan dalam al-qur’an lebih luas khususnya tanggungjawab atas tindakan kita sehari-hari, bukan hanya kativitas bisnis. Seperti yang tercantum dalam Al- Qur’an Surah Al Hajr Ayat 92.⁹



“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua”

Sementara itu, tanggungjawab dalam perspektif islam dala, akuntansi memiliki cakupan yang lebih luas, khususnya tidak hanya hubungan antara agen dan principal tetapi juga hubunga dengan masyarakat (Stakeholder), lingkungan dan tuhan. Menurut Triyuwono,

⁸ Kiswanto, *Analisis Budaya Islam Dan Akuntabilitas*, “*Jurnal Dinamika Akuntansi*”, Vol. 3, No. 2, 2011. h. 78. <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>

⁹ Tafsirq, <https://tafsirq.com/33-al-Hajr/ayat-92>, diakses 1 juli 2023, pukul 15.00.

Allah adalah pencipta dan pemilik tunggal seluruh sumber daya di dunia ini. Allah Swt adalah sumber kepercayaan dan sumber utama bagi pihak-pihak yang terlibat. Dari sumber daya ini, wali bertanggungjawab atas penggunaan, metode dan tujuannya. Bentuk amanah dan akuntansi syariah ditunjukkan pada akuntabilitas .¹⁰

Lebih lanjut menurut Mulawarman, tanggungjawab yang ditunjukkan Triyuwono di atas adalah tanggungjawab dalam kaitannya dengan peran kemanusiannya sebagai khalifatullah fil Ardh. Untuk melengkapi hal tersebut, sesuai dengan sifat akuntansi syariah yang salah satunya didasarkan pada prinsip metode kembar, maka sangat penting adanya keetaraam akuntabilitas yang berpusat pada khalifatullah fil ardh, yaitu tanggungjawab yang berfokus pada abd Allah. Penerapan akuntabilitas perimbangan antara abd Allah dan khalifatullah fil ardh sangat signifikan dalam memperluas sifat dan bentuk pelaporan keuangan berdasarkan hukum syariah. Tanggungjawab abd Allah merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hokum syariah. Berdasarkan sudut pandang di atas, tanggungjawab dapat dibedakan menjadi dua tergantung pada peran orang tersebut, yairu tanggungjawab yang berfokus pada abd Allah dan tanggungjawab yang berfokus pada khalifatullah fil ardh.¹¹

¹⁰ M. Adrian Muluk, et al, *Akuntabilitas Pemimpin Kajian Filosofis Dan Empiris Rumah Sakit Islam*, (Malang: Peneleh, 2022). h. 54.

¹¹ Aji Dedi Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah Rekonsrtuksi Teknologi Akuntansi Syariah*, (Malang: Peneleh 2023). h. 64.

C. Tipe Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas terbagi menjadi dua bagian, yaitu:¹²

- a. Akuntabilitas internal akuntabilitas yang berlaku pada seluruh tingkatan organisasi internal pemerintahan negara, termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat atau pengurus, baik sendir-sendiri maupun kelompok pada suatu tingkat tertentu, harus melaporkan perkembangan pelaksanaannya pada atasan langsungnya, kegiatan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- b. Akuntabilitas eksternal tanggungjawab yang melekat pada setiap badan publik sebagai suatu organisasi untuk menangani seluruh tugas yang diterima dan dilaksanakan serta perkembangan yang perlu dikomunikasikan kepada pihak eksternal mengenai lingkungan hidup.

Menurut Supriatna, tanggung jawab dapat dibedakan menjadi akuntabilitas demokratis, akuntabilitas professional, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas tambahan sebagai berikut:¹³

1. *Democratic Accountability* akuntabilitas demokratis merupakan kombinasi antara tanggungjawab administratif dan tanggungjawab politik. Menggambarkan pemerintahan yang bertanggungjawab atas operasi dan tindakannya kepada para pemimpin politik di Negara-negara demokratis, menteri hadir di parlemen. Penyelenggara pelayanan public menjadi

¹² Kristian Widya Wicaksono, *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*, “*Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*”, Vol, 19, No, 1, 2021, h. 7. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>

¹³ Tjahya Supriatna, *Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Administrasi Publik*, (Bandung: Indra Prahasta, 2000). h.43

tanggungjawab menteri/pimpinan masing-masing lembaga. Dalam konteks ini, pelaksanaan akuntabilitas dilakukan secara bertahap mulai dari pimpinan tingkat atas secara distrinlisasi, khususnya ketua MPR.

2. *Professional Accountability* Dalam hal tanggungjawab professional, pada umumnya para ahli, ahli, dan teknokrat melaksanakan tugasnya berdasarkan norma dan standar profesinya untyk menentukan kepentingan umum atau kemaslahatan sosial..
3. *Legal Accountability* Berdasarkan kategori tanggungjawab hokum (legal), pelaksanaan peraturan hokum yang sesuai dengan manfaat barang dan jasa public merupakan kebutuhan masyarakat (pelanggan). Melalui akuntabilitas hokum, setia[p pegawai negeri dapat diadili jika ia gagal dan melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat akan terlihat jelas dalam laporan pertanggungjawaban ¹⁴

Menurut para ahli berdasarkan beberapa kajian teoritis dapat disimpulkan bahwa ada beberapa akuntabilitas, anantara lain akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, akuntabilitas

¹⁴ Supriatna Tjahya, *Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*, (Aceh: Humaniora Utama Press, 1997). h. 54

demokratis, akuntabilitas professional dan jenis tanggungjawab hukum.¹⁵

D. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pejabat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan kinerja pekerjaannya di hadapan masyarakat. Dalam konteks organisasi pemerintah sendiri, akuntabilitas public melibatkan penyediaan informasi tentang kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan utama akuntabilitas publik adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan pemengku kepentingan lainnya.¹⁶ Akuntabilitas publik yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :¹⁷

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran mengacu pada tanggungjawab entitas publik untuk melaksanakan pekerjaannya dengan jujur dan mematuhi hukum yang berlaku.

¹⁵ Mikael Edowai dan Herminawaty Abubakar Miah Said, h. 21-22

¹⁶ Regina Febriani, Enos Paselle, Hariati, *Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Di Kecamatan Samarinda Ilir Di Kecamatan Samarinda*, "Journal Administrasi Negara", Vol, 7, No, 3, 2019. h. 9. <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=9073>

¹⁷ Fikri Habibi, Arif Nugroho, *Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Pandeglang*, "Jurnal Ilmu Administrasi Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi" , Vol, 17, No, 2, 2018. h. 8. DOI:[10.31113/jia.v15i2.161](https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.161)

2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).

Akuntabilitas manajerial adalah tanggungjawab lembaga public untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien.¹⁸

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).

Merupakan tanggungjawab program untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi harus merupakan program berkualitas yang mendukung strategi dan mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.¹⁹

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan tanggungjawab lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Intitusi publik harus mampu melaporkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Dalam merumuskan suatu kebijakan harus mempertimbangkan tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut dilaksanakan, siapa yang menjadi sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terkena dampaknya dan menikmati manfaat serta dampak (negatif) dari kebijakan tersebut.²⁰

¹⁸ Budiarto, *Pengujian Struktural Pada Komitmen Manajemen Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, "Jurnal Akuntansi Dan Bisnis", Vol 20, No 1, 2020. h. 7. DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v20i1.508>

¹⁹ Budiarto, h. 7

²⁰ Dimas Aufa Moerrin, Hero Priono, *Pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai*, "Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan" Vol, 4, No, 11, 2022. h. 5. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas keuangan merupakan tanggungjawab lembaga publik untuk menggunakan uang rakyat (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tanpa pemborosa, kebocoran modal atau korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.²¹

E. Pentingnya Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi yaitu:

1. Untuk menyediakan kontrol publik demokratis
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).²²

²¹ Berlian Afriansyah, Meriana, Paddery, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)*, "Jurnal Akuntansi", Vol 8, No, 2, 2020. h. 5. DOI: <http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>

²² Beveola Kusumasari, Septiani Dwi Putriani, Enda Layuk, "Akuntabilitas" Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2015, h.9

F. Transparansi

Transparansi secara harafiah berarti jelas, terlihat. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam menjalankan suatu proses operasional.²³ Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk mencapai penerapan tata kelola yang baik (*Good Public Administration*) dan juga untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan memastikan transparansi dalam setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan pemerintahan, organisasi atau bisnis, maka keadilan akan ditegakkan.²⁴

Mardiasmo mengatak adalah suatu cara pengelolaan urusan publik. Sementara itu Rewansyah mengatakan *Governance* mengacu pada proses, khususnya proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara yang tidak hanya partisipatif negara, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan yang ada, termasuk dunia usaha. dan masyarakat sipil.²⁵

Transparansi pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan akses penuh terhadap informasi yang factual dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat dipahami sebagai tindakan membuat suatu permasalahan menjadi jelas dan dapat dipahami oleh

²³ Arifin Tahir, *Kejakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Alfabeta, 2019). h. 109.

²⁴ 4 M.Umar Chapra, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 87

²⁵ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2018). h. 56

masyarakat serta dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi.²⁶

Menurut Abidin, transparansi adalah informasi mengenai organisasi yang mudah, bebas dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkena dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Selain itu, terdapat informasi yang cukup relevan dengan kegiatan organisasi dan di sajikan dalam bentuk atau media yang mudah di pahami. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Hermawan bahwa transparansi dikaitkan dengan informasi yang terbuka dan dapat di akses oleh semua orang.²⁷

Menurut Ratmin, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara utuh dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.²⁸ Transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas. Proses dan informasi dapat diterima langsung oleh pihak-pihak yang memerlukannya.²⁹

Konsep transparansi mengacu pada situasi dimana seluruh aspek dari proses pemberian layanan bersifat terbuka dan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna dan stakeholder yang membutuhkan. Jika seluruh

²⁶ Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi, *Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa (Studi kasus candirejo kecamatan pringapus kabupaten semarang)*, “*Jurnal Ilmiah Edounimika*”, Vol 3, No 2, 2019, h. 6
DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>

²⁷ Daniel Aditya, *Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru*, “*Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*“, Vol, IX, No, 2, 2014, h. 107.
DOI: <https://doi.org/10.15294/dp.v9i2.4886>

²⁸ Ristya Dwi Anggraini, *Transparansi, partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN pacar keling VII*, “*Jurnal Ekonomi*”, Vol, 1, No 2, 2013, h.4.

²⁹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia Di Indonesia Yuridika*, “*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*”, Vol, 28, No, 2, 2013, h. 11. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10171>

aspek proses pemberi layanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, metode layanan, serta hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan, tersedia untuk umum sehingga masyarakat mudah mengakses dan memahaminya, maka penyediaan layanan ini dapat dianggap transparan. Di sisi lain, jika sebagian atau seluruh aspek proses penyedia layanan tertutup dan informasi sulit diperoleh oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya, maka penyedia layanan tidak mematuhi persyaratan aturan transparansi.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi terkait keuangan desa dan informasi lainnya yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya kejelasan atau keterbukaan, tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, segala urusan maupun proses kerja dan perencanaan serta pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh masyarakat. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik manapun yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat dipahami sebagai bentuk tindakan kontrol yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah.

³⁰ Karjuni, *Jurnal Demokrasi*, "Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Publik", Vol,8, No, 1, 2009, h. 47.

G. Transparansi Dalam Persepektif Islam

Transparansi dalam persepektif islam adalah:³¹

1. Pemberian informasi harus disampaikan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
2. Lembaga atau organisasi yang terbuka untuk semua pihak. Semua informasi faktual mengenai bisnis, termasuk informasi keuangan harus tersedia bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
3. Keterbukaan informasi juga harus lengkap, akurat, dan jujur.

Konsep transparansi dalam ajaran islam berkaitan dengan sifat wajib Allah SWT, yaitu shiddiq. Shiddiq artinya baik. Dalam konsep transparansi, makna shiddiq adalah penyampaian informasi yang akurat dan benar kepada pihak-pihak terkait. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat AlAhzab ayat 70:³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”,

Ayat diatas mengandung arti bahwa harus selalu berkata jujur.

Antara apa yang diniatkan dan diucapkan harus selaras. Dan harus

³¹ Riki Soleman, *Transparansi penyaluran dana UMKM bumdes (Analisis Manajemen Syariah)*, “*Jurnal Al Iqtishad*”, Vol, 18, No, 2, 2022. h. 10.

DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v18i2.18163>

³² Tafsirq, <https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-70>, diakses 1 juli 2023, pukul 15.00.

dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dengan demikian pihak BUMDes harus menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena dengan adanya kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan pihak BUMDes.

Nilai transparansi ini dituntut harus menanamkan nilai kejujuran. Kejujuran dalam memberikan informasi kepada pihak terkait. Sehubungan dengan nilai kejujuran dalam hadits Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas juga perkataan jujur. Dalam haditsnya berbunyi:³³

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ
 النَّبِيِّ الْأُولَى، إِذَا لَمْ تُسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. (رواه البخاري)

Dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhumâ, ia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembongong).”

³³ Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/12601>, diakses pada 1 juli 2023, pukul 15.30

Berdasarkan hadits diatas, dapat diketahui bahwa kejujuran adalah sesuatu yang krusial dilakukan pada setiap aspek kelangsungan hidup . Salah satunya yaitu dalam transparansi. Dalam menerapkan prinsip transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran. Kejujuran dalam menyampaikan informasi yang diperlukan oleh pihak terkait. Karena adanya kejujuran dapat menumbuhkan keyakinan atau kepercayaan antara pihak yang memberikan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.³⁴

H. Indikator Transparansi

Menurut Kristianten, indikator transparansi model pengukuran kinerja *good governance* dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:³⁵

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menjamin transparansi dan mencegah penipuan atau penyalahgunaan dana desa. Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk gambar atau teks.
2. Memiliki informasi yang jelas dan lengkap sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap tentang keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah

³⁴ Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/12601>, diakses pada 1 Juli 2023, pukul 15.30.

³⁵ Umi purwanti, *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Melilian Kecamatan Gekumbang Kabupaten Muara Enim*, “*Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*” Vol. 3, No, 2, 2021, h. 8.

DOI: <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>

desa harus memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat mengenai proyek pembangunan yang akan dilaksanakan atau sudah di laksanakan, dengan memasang pengumuman pada papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat dan aparat pemerintah juga berhak mengetahui kemajuan pengelolaan dana desa dengan memantau kemajuan pembangunan desa.

3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa otoritas Badan publik wajib memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menimbulkan kebingungan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan mendalam tentang proses pengelolaan dana desa.
4. Kerangka hukum yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa, sebagian besar diatur dalam peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014, yang secara jelas menetapkan prosedur pengelolaan yang ditetapkan selain peraturan dan tanggungjawab, pemerintah juga harus menyiapkan laporan anggaran rinci dengan dokumen pendukung yang dibuat untuk setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dengan dokumen tersebut.

1. Karakteristik Transparansi

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam segala tindakan dan siap menerima kritik dan komentar yang dapat diatribusikan dan dapat dipastikan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut:³⁶

1. *Informativeness* (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, dan penjelasan mekanisme kepada pihak-pihak terkait, memerlukan informasi yang jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openess* (Keterbukaan) merupakan hak yang harus dimiliki oleh pihak-pihak terkait dalam mengakses informasi..
3. *Disclosure* (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib artinya segala sesuatu yang telah menjadi kewajiban berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan otoritas pengawasan. Pada saat yang sama pengungkapan informasi sukarela dilakukan secara sukarela di luar cakupan persyaratan perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan lembaga pengawas.

Jika melihat ciri-ciri di atas transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat akses yang lebih luas dan mudah terhadap informasi dan data keuangan yang akurat. Oleh karena itu transparansi merupakan aspek alamiah dalam penyelenggaraan pemerintah

³⁶ Aprilia Puspasari, *Prinsip-Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas*, "Jurnal Perspektif", Vol, 17, No, 2, 2019, h. 10.
DOI: <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2.6482>

dan penting dalam pengelolaan dan desa. Sehingga masyarakat mempunyai hak untuk leluasa mengakses informasi mulai dari perencanaan hingga hasil yang telah dicapai.³⁷

J. Prinsip-Prinsip Transparansi

Untuk mencapai transparansi, prinsip-prinsip tertentu tentu saja harus dihormati. Forum kemanusiaan Indonesia secara jelas menyebutkan enam prinsip transparansi yaitu: .³⁸

1. Terdapat informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses mengenai pembiayaan, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan dan jenis dukungan atau program.
2. Terdapat informasi yang dipublikasikan dan sarana untuk mengakses informasi mengenai proses bisnis dan rincian keuangan.
3. Terdapat laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai penggunaan sumber daya alam dalam bentuk pembangunan proyek yang dapat diakses oleh publik.
4. Adanya laporan tahunan dikeluarkan mengenai keadaan keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen dan bukti.

³⁷ Diatul Fajri, Rizal Rizal, Nofrivul Nofrivul, *Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar,* " *Jurnal Akuntansi Syariah*", Vol, 1, No, 1, 2021. h. 9

DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2733>

³⁸ Taufiqul Musyifik Arromzi, " *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batu Putih Laok Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep*", Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jember, 2022), h. 47.

5. Adanya website atau media yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan di organisasi desa.
6. Ada instruksi untuk menyebarkan informasi.

K. BUMDes

BUMDes sebagai organisasi berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha desa mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peran berasal dari kata role yang mempunyai arti yaitu seperangkat tingkat harapan yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Sedangkan peran merupakan bagian dari tugas pokok yang harus diselesaikan.³⁹

1. Tujuan Bumdes

- a. Meningkatkan pendapatan.
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- c. Memaksimalkan potensi sumber daya, menjadi alat keseimbangan
- d. Alam melayani kebutuhan masyarakat mengembangkan perekonomian desa.

2. Fungsi BUMDes

Fungsi BUMDes berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BUMDes yaitu:

- a. Merupakan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara mengelola potensi desa

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1989.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.

- b. Sebagai organisasi sosial, ia harus membela kepentingan masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam pemberian pelayanan sosial.
- c. Menjadi organisasi bisnis yang membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan atau dengan kata lain membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Mustanir, et al, *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021). h. 40-42

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya BUMDes Tanjung Raya

Desa Tanjung Raya, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim merupakan desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan telah beroperasi selama 3 tahun. Diketahui dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah peraturan daerah No 60 tahun 2017 Kabupaten Muara Enim tentang pedoman pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Muara Enim dan hasil musyawarah Desa Tanjung Raya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2020 bertempat dikantor Kepala Desa. Desa Tanjung Raya, Kecamatan Kecamatan Semende Darat Tengah, unit usaha milik desa Tanjung Raya ini didirikan pada tanggal 8 Maret 2020 dengan modal sebesar Rp.20.000.000.¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah organisasi usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes, menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

¹ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2023, Pukul 15:30 Wib.

Sebagai lembaga perekonomian yang beroperasi dipedesaan. BUMDes harus berbeda dengan lembaga perekonomian pada umumnya. Tujuannya agar keberadaan aktivitas BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan dengan tujuan menjadi badan usaha desa, untuk mendorong/mendukung segala kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, baik yang dikembangkan menurut adat istiadat budaya setempat maupun kegiatan ekonomi yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat desa.

B. Tujuan Berdirinya BUMDES Desa Tanjung Raya

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (kewirausahaan) bagi masyarakat Desa yang berpendapatan rendah.
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan antar desa
5. Meningkatkan pendapatan sumber-sumber desa dan memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

² Penjelasan Atas Pasal 213 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

6. Meningkatkan peluang usaha untuk mengurangi pengangguran dan membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
7. Merupakan pusat pelayanan ekonomi dan merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat desa.³

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi desa yang efektif dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kerjasama, partisipasi, liberasi, transparansi, tanggungjawab dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memastikan pengelolaan unit-unit usaha tersebut efisien, efektif, professional, dan mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produksi dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan jasa distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan perangkat desa secara fisik. Upaya tersebut dilakukan agar tuntutan tersebut tidak membebani masyarakat. Karena BUMDes akan menjadi badan usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa. Undang-undang mengatur bahwa BUMDes dapat dibentuk tergantung kebutuhan dan potensi desa.⁴

³ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2023, Pukul 15:30 Wib.

⁴ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, Tanggal 11 Mei 2023, Pukul 15:30 Wib.

C. Program-Program BUMDes Desa Tanjung Raya

1. Program koperasi desa
2. Pasar Desa
3. Program Air Bersih
4. Program tabung gas elpiji

D. Visi Misi BUMDes Desa Tanjung Raya

1. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM

2. Misi

- a. Mengembangkan dana desa untuk menjadi motor penggerak untuk memajukan kegiatan perekonomian masyarakat desa
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa antara lain melibatkan masyarakat dalam aktivitas unit usaha BUMDes melalui kerjasama usaha.
- c. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa berkat kegiatan BUMDes
- d. Mengelola dan melaksanakan program desa dalam bentuk dana bergulir, bergulir khususnya dalam rangka pengembangan usaha ekonomi pelaksanaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

E. Landasan hukum bumdes

Pendirian Badan Usaha Desa (BUMDes) didasarkan pada undang-undang no.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no. 72 tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci, dua landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah.⁵

- a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.
- b. PP no. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

- 1) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perangkat desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Pendirian badan usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai status hukum.

⁵ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Jakarta: PP-RDN, 2007, h. 9

Pasal 79

- 1) Badan usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah badan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 - a) Pemerintah desa.
 - b) Tabungan masyarakat.
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d) Pinjaman dan/atau e) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan usaha desa diperbolehkan memberika pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

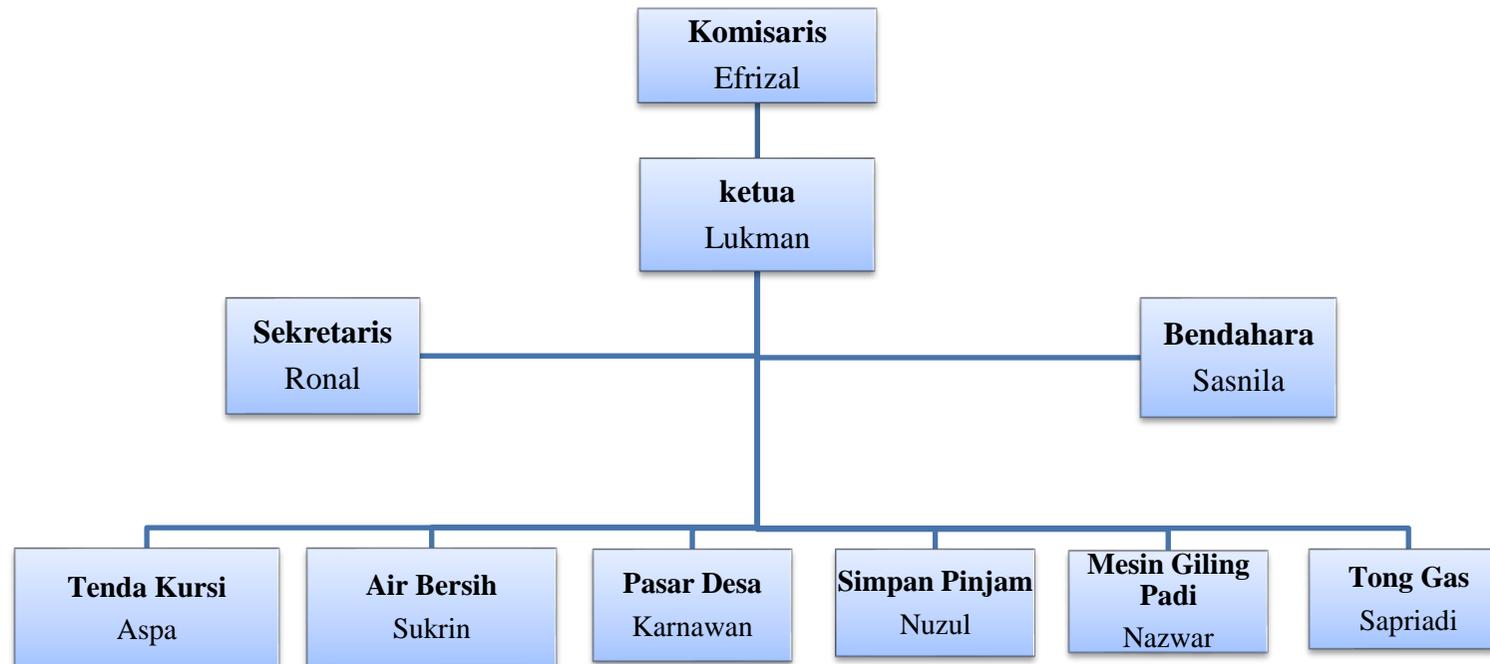
- 1) Peraturan lain yang berkaitan dengan tata cara pendirian dan pengurusan badan usaha tingkat desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a) Bentuk badan hukum.
 - b) Kepengurusan.
 - c) Hak dan kewajiban.
 - d) Permodalan.
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan.
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga.
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

F. Struktur Bumdes Desa Tanjung Raya

Struktur organisasi BUMDes Desa Tanjung Raya sebagai berikut:

Gambar 1.1



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tentang, “Akuntabilitas dan Transparansi BUMDes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah”, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mencoba untuk menggali informasi bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi di BUMDes Desa Tanjung Raya, dan juga untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dengan mewawancarai beberapa informan yang terkait. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka peneliti menetapkan jumlah informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yaitu informan yang memiliki jabatan sebagai komisaris, ketua, dan bendahara Pada BUMDes Desa Tanjung Raya dengan jumlah informan sebanyak 3 orang. Dan juga dari 6 pihak internal BUMDes serasan serta masyarakat Desa Tanjung Raya Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan yaitu:

1. Apakah BUMDes di desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Erizal sebagai informan yang mana menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah sesuai menurut aturan dan perundang undangan masalah BUMDes”¹

Hal yang sama juga yang di sampaikan oleh informan lainnya yaitu bapak Lukman dimana bapak Lukman menyampaikan bahwa:

¹ Efrizal Komisaris BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

“BUMDes yang sudah ada sudah sesuai dengan perundangan BUMDes yang berlaku”²

Sedangkan pendapat dari ibu Sasnila juga menyampaikan hal yang sama bahwa:

“aturan BUMDes yang ada di desa tanjung raya sudah sesuai dengan aturan BUMDes yang berlaku”³

Berdasarkan hasil observasi dari wawancara bahwasannya dari pernyataan 3 responden di atas menunjukkan bahwa BUMDes yang berjalan di Desa Tanjung Raya sudah berjalan dengan peraturan dan undang-undang tentang BUMDes yang berlaku.

2. Apakah setiap transaksi selalu terbuka kepada masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“untuk masalah transaksi yang ada di BUMDes Tanjung Raya tidak bisa terbuka kepada masyarakat karena hal ini sesuai dengan peraturan yang ada bahwasannya pengguna BUMDes dirahasiakan jikalau memang diperlukan informasi karena hal mendesak maka bisa dilakukan melalui prosedur-prosedur yang ada”⁴

Hal yang sama juga di sampaikan oleh informan lainnya yaitu bapak Lukman dimana bapak Lukman menyampaikan bahwa:

“Tidak pernah dimana informasi kalau hanya untuk peminjaman dirahasiakan demi melindungi pengguna BUMDes Serasan, akan tetapi kalau untuk transaksi mengenai pengeluaran usaha yang lainnya tetap disampaikan kepada masyarakat”⁵

² Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

³ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

⁴ Efrizal Komisaris BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁵ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

Begitu juga pendapat yang disampaikan dari ibu Sasnila bahwa:

“terbuka kepada masyarakat akan tetapi dengan catatan disampaikan pada saat musyawarah transaksi-transaksi apa saja yang dilakukan oleh BUMDes dan juga ada nama-nama yang dirahasiakan terkait transaksi”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwasannya dari pernyataan 3 responden di atas dapat di simpulkan bahwa terkait informasi transaksi tidak bisa terlalu terbuka kepada masyarakat ada yang dirahasiakan demi menjaga pengguna BUMdes itu sendiri.

3. Apakah pernah ada terjadi penyelewengan dana BUMDes yang dilakukan pengelola ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Alhamdulillah sampai saat ini dewan pengawas tetap mengawasi masalah keuangan setiap tahun di awasi per triwulan dan satu tahun diadakan evaluasi kembali untuk menentukan keuangan BUMDes dan Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada penyelewengan sama sekali”⁶

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Tidak pernah karena setiap laporan akhir tahun uang yang di dapat langsung di setor ke bank. Dan juga dari uang yang didapat langsung dimasukkan ke dalam rekening BUMDes”⁷

Pendapat yang juga di sampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan bahwa:

⁶ Efrizal Komisararis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁷ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

“Tidak pernah karena setiap unit kerja akan langsung menyetorkan ke saya setiap uang yang di dapat kemudian saya akan langsung memasukkan ke dalam rekening BUMDes”⁸

Berdasarkan hasil dari pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan BUMDes sendiri memegang sifat amanah dan jujur dalam memegang jabatannya masing-masing sehingga tidak pernah ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak pengelola

4. Bagaimana pelaksanaa usaha BUMDes desa tanjung raya, apakah sudah berjalan dengan lancar ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa :

“halangan dan rintangan pasti ada, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu alhamdulillah berjalan dengan lancar, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang usaha BUMDes sudah maksimal”⁹

Sedangkan pendapat dari bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Selama ini BUMDes desa tanjung raya meliputi beberapa bidang pertama air bersih, tenda kursi, pasar desa mesin giling padi dan simpan pinjam.itu sudah berjalan dengan lancar”¹⁰

Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah sudah lancar, meskipun ada pasang surut dalam menjalankan usaha yang dijalankan oleh BUMDes Serasan akan tetapi sampai dengan saat ini usaha yang dikerjakan di berbagai

⁸ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

⁹ Efrizal Komisararis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

¹⁰ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

bidang sudah berjalan dengan maksimal dan sangat mendongkrak sekali bagi masyarakat Desa Tanjung Raya”¹¹

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan usaha yang telah di bagi beberapa unit telah berjalan dengan lancar walaupun dalam menjalankan usaha ada pasang surut pengelola BUMDes terus berusaha menjalankan dan sekarang dampak sedikit demi sedikit bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya.

5. Bagaimana manajemen pengelolaan keuangan di BUMDes desa tanjung raya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Manajemen keungan sesuai dengan fungsi masing-masing yang diatur dalam SK kepengurusan”¹²

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Uang yang di dapat dari unit kerja langsung disetorkan ke bank, lalu tidak lupa juga dituliskan di buku kas BUMDes”¹³

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan:

“Alhamdulillah manajemen pengelola BUMDes sudah berjalan dengan baik, dan sesuai dengan unit kerjanya masing-masing”¹⁴

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelola keuangan yang telah dilakukan oleh

¹¹ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

¹² Efrizal Komisararis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juili 2023, Pukul 09 : 30 WIB

¹³ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

¹⁴ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

BUMDes Serasan sudah di atur dalam SK kepengurusan masing-masing sehingga nanti uang yang di dapat langsung dimasukkan ke dalam rekening BUMDes Serasan supaya tidak ada penyelewengan dan pas proses pelaporan bisa menunjukkan bukti slip penyetoran.

6. Bagaimana manajemen pengelola BUMDes jika terjadi kesalahan di mata masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Akan dimusyawarakan, dan dapat di evaluasi dan dewan penasehat menasehati bagi anggota-anggota yang kira-kira melakukan kesalahan dan apabila kejadian tersebut terulang kembali maka akan diberikan sanksi-sanksi yang ada. Dan musyawarah yang dilakukan ini tidak terjadwal artinya jika terdapat laporan terjadi kesalahan kami selaku pengurus BUMDes langsung melakukan penyelesaiannya”¹⁵

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Kami melakukan musyawarah dan dipecahkan melalui musyawarah sampai dengan ketemu solusi dari masalah tersebut dan juga melakukan antisipasi agar kesalahan-kesalahan tidak terulang kembali”¹⁶

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Kami melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga nantinya akan muncul solusi untuk memecahkannya.”¹⁷

¹⁵ Efrizal Komisararis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

¹⁶ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

¹⁷ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelola yang telah dilakukan oleh BUMDes Serasan sudah terjalin kekompakan dimana jika terjadi kesalahan yang dilakukan akan berusaha mencari solusi dan berusaha menyelesaikannya melalui musyawarah agar nama baik BUMDes Serasan tidak buruk

7. Bagaimana tahap-tahap program kerja yang dilakukan BUMDes ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“awal mulanya BUMDes ini hanya terdiri dari dua usaha yaitu air bersih dan tong gas saja, air bersih disalurkan kepada penduduk yang tidak menggunakan sumur.”¹⁸

Sedangkan pendapat yang lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Masalah program kerja BUMDes setiap tahun itu ada khusus dana BUMDes melalui dana desa, kepala desa menyalurkan ke BUMDes supaya unit kerja bisa membuat usaha yang baru lagi”¹⁹

Hal yang disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan bahwa:

“Tahap-tahap program kerja BUMDes sesuai dengan unit kerjanya masing-masing”²⁰

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh program kerja yang dilakukan BUMDes Serasan sudah ada

¹⁸ Efrizal Komisarisi BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

¹⁹ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

²⁰ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

dana yang turun dari atas dan akan dikelola untuk program kerja yang ada pada BUMDes Serasan yang disesuaikan oleh unit kerjanya masing-masing.

8. Apakah kualitas kinerja karyawan keungan BUMDes meningkat setiap tahunnya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa :

“Tetap di evaluasi setelah di evaluasi peningkatan-peningkatan untuk anggota BUMDes Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada peningkatan baik SDM, administrasi, dan juga pelaporan-pelaporan yang lain”²¹

Sedangkan pendapat yang di sampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah sedikit-sedikit ada peningkatan, termasuk juga penghasilan”²²

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan bahwa:

"Alhamdulillah ada peningkatan di setiap tahunnya, baik SDM dan juga yang lainnya”²³

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan BUMDes Serasan baik dalam SDM, administrasi dan juga yang lainnya sudah ada peningkatan meskipun tidak secara signifikan dan cepat akan tetapi dampak dari peningkatan kinerja menunjukkan kemajuan BUMDes yang ada di Desa Tanjung Raya itu sendiri.

²¹ Efrizal Komisarisi BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

²² Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

²³ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

9. Apakah program yang dijalankan BUMDes berpengaruh kepada masyarakat desa tanjung raya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Sangat berpengaruh sekali, karena sangat membantu bagi masyarakat”²⁴

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Sangat berpengaruh sekali, karena sangat membantu bagi masyarakat”²⁵

Hal yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan bahwa:

“Sangat berpengaruh, dan alhamdulillah bisa membantu masyarakat”²⁶

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa program-program yang dijalankan BUMDes Serasan sudah berpengaruh kepada masyarakat dan juga bisa membantu masyarakat yang ada di Desa Tanjung Raya.

²⁴ Efrizal Komisarisi BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

²⁵ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

²⁶ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

10. Bagaimana langkah BUMDes ketika mengalami kesulitan dalam proses pelaporan di BUMDes desa tanjung raya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Kami ada pendampingan dan terus bertanya kepada pendamping-pendamping desa apabila ada kendala-kendala masalah pelaporan”²⁷

Sedangkan pendapat yang lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Kami melalui musyawarah nanti dikumpulkan terutama dari perangkat desa mungkin ada masukan-masukan kita pecahkan bersama dan bisa memunculkan hasil yang terbaik”²⁸

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan bahwa:

“Kami diawasi oleh dewan pengawas supaya nanti jika ada kesulitan dapat bertanya dengan dewan pengawas”²⁹

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan BUMDes Serasan setiap melakukan proses pelaporan keuangan akan menghadirkan perangkat desa dan juga pendamping yang nantinya jika terjadi kesalahan dan kesulitan bisa langsung bertanya kepada pendamping dan juga perangkat desa sehingga laporan keuangan nanti bisa terselesaikan dengan baik.

²⁷ Efrizal Komisarlis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

²⁸ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

²⁹ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

11. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes desa tanjung raya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Mekanisme pertanggungjawaban kepada kepala desa, ini setiap tiga bulan sekali kepala desa memanggil masalah keuangan dan satu tahun pelaporan tahunan di monitor kinerja bagi unit kerja BUMDes masing-masing”³⁰

Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Pertama kami melaporkan dulu ke komisaris direspon oleh komisaris silahkan di laporkan dan kami hadirkan masyarakat, sifat BUMDes adalah badan usaha milik desa jadi masyarakat harus mengetahui masalah BUMDes ini”³¹

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan bahwa:

“laporan pertanggungjawaban kami serahkan dulu ke komisaris untuk diperiksa supaya apabila terjadi kekurangan bisa kami perbaiki sebelum menyampaikan kepada masyarakat”³²

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa proses pertanggungjawaban laporan yang telah dilakukan oleh pengelola BUMDes juga tidak dilaporkan sembarangan ke masyarakat dimana komisaris akan melihatnya terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat. Agar informasi yang disampaikan tidak mengada ada yang nanti dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

³⁰ Efrizal Komisaris BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

³¹ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

³² Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh bapak Apriadi selaku kadus dusun 4 beliau menyatakan:

“Kami sama sekali tidak tahu mengetahui mekanisme pertanggungjawaban keuangan pengelola BUMdes karena pada saat laporan keuangan di buat kami tidak di undang dan laporan itu di buat oleh pengelola BUMDes sendiri”

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh bapak munhar selaku kadus dusun 1 beliau menyatakan:

“Kalo masalah pertanggungjawaban keuangan kami kurang mengetahui karena yang menyusun laporan dari pengelola BUMDes itu sendiri”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak handri selaku kadus 2 beliau mengatakan bahwa:

“Saya sih kurang paham tentang mekanisme pertanggungjawaban yang ada pada BUMDes karena kami tidak di undang pada saat penyusunan laporan keuangan itulah sebab nya yang mengetahui adalah pengelola bumdes sendiri”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Desi selaku kadus dusun 3 beliau mengatakan bahwa:

“memang benar kami memang tidak mengetahui alur pertanggungjawaban laporan keuangan BUMDes karena kami di undang hanya pada saat musyawarah hasil kerja saja kalau dalam hal penyusunan kami tidak di undang”

Pendapat dari ibu Patri selaku RT 1 Desa Tanjung Raya juga mengatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban laporan BUMDes kan mereka sendiri yang buat jadi hanya mereka yang tau mekanisme pertanggungjawaban keuangan BUMDes”

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh ibu disma selaku RT 2 beliau menyatakan:

“alur keuangan BUMDes kan pengelola yang menyusunnya jadi kami kurang mengetahui soal itu, kami hanya hadir pada saat rapat tahunan saja”

Berdasarkan pendapat dari keenam informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang mengetahui tentang keuangan BUMDes hanya pegelola saja itu bisa dilihat dari wawancara di atas kalau mereka tidak di undang dalam hal penyusunan laporan keuangan akan tetapi hadir pada saat rapat tahunan saja.

12. Apakah BUMDes melakukan pelaporan keuangan secara rutin ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Setiap per triwulan, artinya per 3 bulan BUMDes melapor masalah keuangan yang ada di BUMDes”³³

Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Kami melakukan pelaporan rutin satu tahun sekali dan pengecekan setiap triwulan”³⁴

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyampaikan bahwa:

“Ya kami melaporkan setiap triwulan dan kemudian nanti disampaikan kepada masyarakat pada musyawarah tahunan akan tetapi setiap tiga bulan akan ada pengecekan dari komisaris”³⁵

³³ Efrizal Komisaris BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

³⁴ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

³⁵ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

Berdasarkan hasil pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola akan membuat laporan setiap 3 bulan sekali yang dimana komisaris akan mengecek nantinya, ini bisa dikatakan jika terjadi penyelewengan atau kesalahan akan langsung diketahui dan segera di ambil tindakan.

13. Bagaimana tahap pengelolaan keuangan BUMDes desa tanjung raya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Pengelolaan keuangan BUMDes untuk desa tanjung raya unit kerja ini memberikan transfer uang ke rekening direktur BUMDes”³⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyapaikan bahwa:

“Setiap unit kerja masing-masing nantinya akan langsung nyetor langsung ke bank”³⁷

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh ibu sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Tahap pengelolaan keuangan BUMDes desa tanjung raya setiap uang yang di dapat dari usaha langsung di masukkan ke rekening BUMDes”³⁸

Berdasarkan hasil dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa tahap pegelolan keuangan yang ada di BUMDes Serasan setiap uang akan langsung di masukkan ke dalam rekening sehingga nantinya pengelola

³⁶ Efrizal Komisaris BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

³⁷ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

³⁸ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

tinggal melaporkan hasil yang di dapat saja agar tidak ada unsur kekhilafan yang dilakukan pengelola.

14. Siapa yang mengontrol penerimaan dan pengeluaran dalam kegiatan BUMDes desa tanjung raya ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Yang mengontrol penerimaan dan pengeluaran Ketua, Pengawas dan Bendahara”³⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyampaikan bahwa:

“Tentunya Ketua, pengawas dan bendahara yang mengontrolnya, Juga setiap tahunnya kan Dana dari APBDes itu selalu keluar untuk bisa menjalankan program-program kami kedepannya”⁴⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyapaikan bahwa:

“Dewan pengawas, ketua dan bendahara”⁴¹

Berdasarkan hasil dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa pihak petinggi dari BUMDes sendiri sangat mengawasi setiap kegiatan yang ada di BUMDes Serasan agar tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan orang banyak.

³⁹ Efrizal Komisararis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁴⁰ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁴¹ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

15. Bagaimana cara BUMDes desa tanjung raya memberikan informasi kepada masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Setiap hari jumat, pada sebelum sholat jumat disampaikan pengumuman bahwasannya akan di adakan rapat tahunan kepada masyarakat masalah keuangan, kinerja dan unit-unit kerja yang da di BUMDes”⁴²

Sedangkan pendapat yang lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“Kita melalui sholat jumat dan di undang ke pertemuan nanti di kasih informasi kepada masyarakat, tapi pada saat pengumuman tentang akan diadakannya informasi keuangan dan masyarakat yang di undang hanya perwakilan saja, seperti perangkat Desa dan RT ”⁴³

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Setiap hari jumat disampaikan kepada masyarakat untuk penyampaian pengumuman akan diadakannya pelaporan keuangan BUMDes.”⁴⁴

Berdasarkan hasil pernyataan dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan pihak BUMDes kurang efektif di mana masyarakat yang tau hanya yang datang pas sholat jum'at saja dan yang diundang hanya perwakilan sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi keuangan BUMDes Serasan.

⁴² Efrizal Komisaris BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁴³ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁴⁴ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

16. Apakah informasi keuangan yang di sampaikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan fakta ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Alhamdulillah sesuai dengan fakta, karena ini menyangkut masalah keuangan pertanggungjawabannya sangat di pertanggungjawabkan dan sangat transparan sekali kepada masyarakat”⁴⁵

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“Kami melaporkan keuangan yang di sampaikan kepada masyarakat sangat transparan sekali jadi sesuai dengan fakta yang ada”⁴⁶

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan fakta yang ada, karena informasi keuangan sangat sensitif sekali jadi kami menyampaikan sesuai dengan fakta”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Serasan sangat mempertanggungjawabkan sekali tentang informasi keuangan yang disampaikan yang di mana uang adalah sesuatu yang sensitif jadi harus disampaikan secara jelas dan nyata.

⁴⁵ Efrizal Komisararis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁴⁶ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁴⁷ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

17. Media apa saja yang digunakan pengelola BUMDes untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Satu media elektro seperti whatsapp juga media-media yang lain seperti tayangan-tayangan iklan sejenis spanduk dan juga buku uang masuk dan uang keluar”⁴⁸

Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“Melalui media whatsapp dan langsung menyampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah terbuka”⁴⁹

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Media elektronik seperti whatsapp spanduk dan lain-lain”⁵⁰

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola BUMDes Serasan menyampaikan informasi menggunakan sosial media dan juga lewat iklan seperti spanduk hal ini akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang ada di BUMDes Tanjung Raya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Sarah selaku masyarakat Desa Tanjung Raya beliau mengatakan bahwa:

“

⁴⁸ Efrizal Komisarisi BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁴⁹ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁵⁰ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

18. Apakah informasi yang ada pada BUMDes mudah di akses masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“karena kami menyampaikan langsung kepada masyarakat tidak melalui jaringan internet atau website tapi apabila masyarakat ingin menyampaikan informasi kami tetap disampaikan ke kantor melalui prosedur yang ada”⁵¹

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“kami menyampaikan tidak secara online atau melalui halaman resmi website BUMDes, karena belum ada halaman website akan tetapi jika masyarakat ingin mengetahui maka bisa langsung datang ke tempat BUMDes kami.”⁵²

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Sangat mudah, masyarakat sudah mengetahui tentang unit-unit kerja masing-masing yang ada pada BUMDes Serasan dan untuk informasi hanya disampaikan jika ada keperluan mendesak saja”⁵³

Berdasarkan hasil pernyataan dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa informasi tidak sembarang informasi disampaikan kepada masyarakat akan tetapi jika masyarakat ingin mengetahui maka dapat datang

⁵¹ Efrizal Komisaris BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁵² Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁵³ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

langsung ke kantor BUMDes untuk memperoleh informasi dengan prosedur yang ada

19. Apakah laporan keuangan yang disajikan BUMDes desa tanjung raya mudah di pahami masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Tidak seluruhnya paham, tetapi Alhamdulillah dengan adanya penyampaian-penyampaian dari BUMDes masyarakat sedikit-sedikit lebih paham dan sudah tau masalah keuangan BUMDes”⁵⁴

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“yang datang biasanya cuma perwakilan mungkin ada yang paham dan juga ada juga yang tidak, akan tetapi sedikit-sedikit masyarakat tau tentang laporan keuangan BUMDes Tanjung Raya”⁵⁵

Pendapat lain juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Tidak semuanya akan tetapi ada juga masyarakat yang mengerti dan paham”⁵⁶

Berdasarkan hasil dari pernyataan dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruhnya masyarakat tau tentang laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes akan tetapi masyarakat yang tau sedikit-sedikit

⁵⁴ Efrizal Komisararis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁵⁵ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁵⁶ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

menjelaskan kepada masyarakat yang kurang mengerti sehingga dapat memahami.

Berdasarkan pendapat dari bapak Apriadi selaku kadus dusun 4 beliau mengatakan:

“Informasi keuangan yang disampaikan kepada kami alhamdulillah kami paham dan juga tidak terlalu bertele tele, dan perwakilan yang lain saya rasa juga paham akan hal itu”⁵⁷

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Munhar selaku kadus dusun 1 beliau mengatakan:

“ kami paham betul dari informasi yang telah disampaikan dan juga dari kawan-kawan yang lain juga begitu akan tetapi kan yang di undang ini hanya sebagian masyarakat saja jadi informasi tidak menyeluruh tau, kemudian memang masyarakat yang niat saja mau nanya ke perwakilan apa hasil dari rapat tahunan BUMDes”⁵⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Desi selaku kadus dusun 3 beliau menyatakan:

“informasi yang kami terima dari pengelola BUMDes alahmdulillah kami paham akan tetapi kan ini yang di undang hanya perwakilan jadi hanya sebatas kami saja yang tau”⁵⁹

⁵⁷ Apriadi Kadus 4 , *Wawancara*, tanggal 23 November 2023, Pukul 10 : 30 WIB

⁵⁸ Munhar Kadus 1 , *Wawancara*, tanggal 23 November 2023, Pukul 11 : 00 WIB

⁵⁹ Desi Kadus 3 , *Wawancara*, tanggal 23 November 2023, Pukul 11 : 20 WIB

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Handri selaku kadus dusun 2 beliau menyatakan:

“Kami paham tentang keuangan yang disampaikan oleh pengelola dan juga bagi masyarakat ingin mengetahui bisa bertanya kepada kami tentang informasi mengenai rapat tahunan BUMDes Serasan”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes masih kurang transparan mengenai informasi yang ada ini bisa di lihat dari hasil wawancara di atas bahwa hanya pengelola dan perangkat desa saja yang tau tentang keuangan BUMDes Serasan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu sarah selaku masyarakat Desa Tanjung Raya beliau mengatakan bahwa:

“Kami tidak paham dengan keuangan yang ada pada BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya yang kami tau hanya membeli barang dan kebutuhan yang perlu saja.”⁶¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ramadi selaku masyarakat Desa Tanjung Raya beliau mengatakan bahwa:

“kami sama sekali tidak paham akan keuangan yang kami paham cumam membeli barang dan juga kebutuhan yang lain, kalau masalah keuangan pengelola BUMDes yang tahu”⁶²

Pendapat dari ibu Sari beliau juga mengatakan bahwa:

“Kami sama sekali tidak tahu tentang keuangan BUMDes dan juga yang di undang pada saat rapat ada sebagian masyarakat jadi kami yang tidak pernah di undang tidak tahu akan keuangan BUMDes”⁶³

⁶⁰ Handri Kadus 2 , *Wawancara*, tanggal 23 November 2023, Pukul 11 : 40 WIB

⁶¹ Sarah Masyarakat , *Wawancara*, tanggal 23 November 2023, Pukul 13 : 15 WIB

⁶² Ramadi Masyarakat , *Wawancara*, tanggal 24 November 2023, Pukul 12: 15 WIB

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak tahu tentang keuangan BUMDes serasan karena mereka tidak pernah di undang dalam rapat tahunan BUMDes Searsan

20. Apakah setiap informasi keuangan yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta yang ada ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan:

“ini kan tentang keuangan sangat sensitif apabila informasi yang diberikan tidak sesuai dengan reliata jadi pihak BUMDes menyampaikannya sesuai dengan fakta yang ada dan masyarakat mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan”⁶⁴

Sedangkan pendapat yang juga disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan fakta yang ada, karena ini menyangkut keuangan jadi kami melaporkan sesuai dengan fakta yang ada”⁶⁵

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau meyakini bahwa:

“Sudah sesuai dengan fakta yang ada”⁶⁶

Berdasarkan hasil pernyataan dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan yang harus disampaikan secara jelas dan sesuai dengan fakat supaya dapat memberikan rasa percaya dari masyarakat dan

⁶³ Sari Masyarakat , *Wawancara*, tanggal 24 November 2023, Pukul 13: 00 WIB

⁶⁴ Efrizal Komisarisi BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁶⁵ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁶⁶ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

untuk mendukung kemajuan BUMDes Serasan itu sendiri. Dan masyarakat tidak akan menganggap bahwa keuangan yang dikelola jelas arahnya kemana.

21. Apakah pengungkapan keuangan BUMDes desa tanjung raya sudah berdasarkan standar akuntansi ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Alhamdulillah sudah sesuai dengan standar akuntansi, karena masalah keuangan ini menyangkut pembukuan jadi harus rell harus nyata artinya keuangan BUMDes ini benar-benar dikerjakan oleh ahli di bidang keuangan”⁶⁷

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan di kerjakan oleh yang ahli dalam bidang keuangan”⁶⁸

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai karena ini menyangkut pembukuan jadi harus sesuai dengan standar akuntansi”⁶⁹

Berdasarkan hasil dari pernyataan dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan laporan keuangan sendiri di kerjakan oleh yang paham tentang keuangan supaya nanti laporan yang di buat tidak asal asalan atau tidak jelas.

⁶⁷ Efrizal Komisarisi BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁶⁸ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁶⁹ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

22. Pengungkapan apa saja yang pernah dilakukan oleh pengelola BUMDes ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Pengungkapan-pengungkapan banyak masalah penambahan modal perlu di sampaikan perlu di ungkapkan oleh BUMDes sudah itu masalah perlengkapan-perlengkapan BUMDes di usulkan ke pemerintah desa melalui BUMdes ini ungkapan-ungkapan untuk menunjang masalah kemajuan BUMDes yang ada di desa tanung raya”⁷⁰

Sedangkan Pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“Pengungkapan yang kami sajikan sesuai dengan dana yang ada atau yang kami pegang termasuk penghasilan dan Pengeluaran BUMDes”⁷¹

Pendapat yang juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Pengungkapan unit usaha dan laporan keuangan di bidang kerja masing-masing”⁷²

Berdasarkan hasil dari pernyataan dari 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Searasan hanya melakukan pengungkapan tentang dana yang nantinya untuk menambah perlengkapan-perlengkapan supaya BUMDes dapat bergerak dengan lebih maju kedepannya juga BUMDes sendiri melakukan pengungkapan tentang pengeluaran dan penghasilan BUMDes serasan.

⁷⁰ Efrizal Komisararis BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁷¹ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁷² Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

23. Pengungkapan keuangan BUMDes dalam 1 periode Kepengurusan berapa kali disampaikan kepada masyarakat ?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Efrizal beliau menuturkan bahwa:

“Untuk pengungkapan itu hanya satu tahun satu kali karena masalah keuangan desa ini di APBDes hanya satu tahun APBDes dan perubahan-perubahannya”⁷³

Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh bapak Lukman beliau menyatakan bahwa:

“Kami hanya melaporkan satu tahun sekali”⁷⁴

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ibu Sasnila beliau menyatakan bahwa:

“Menyangkut pengungkapan kami selalu menyampaikan kepada masyarakat satu tahun sekali karena BUMDes sifatnya tahunan”⁷⁵

Berdasarkan hasil dari pernyataan 3 responden di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan masalah keuangan dan yang lainnya pihak pengelola hanya menyampaikan setauan sekali ini sudah ada dari APBDes sendiri

⁷³ Efrizal Komisaris BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09 : 30 WIB

⁷⁴ Lukman Ketua BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 09: 00 WIB

⁷⁵ Sasnila Bendahara BUMDes, *Wawancara*, tanggal 19 Juli 2023, Pukul 19: 00 WIB

B. Pembahasan

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, serta beberapa dokumentasi baik berupa foto maupun rekaman yang mana sengaja di ambil oleh peneliti guna untuk mendukung keabsahan serta valid atau tidaknya sebuah data yang didapatkan oleh peneliti.

Tabel 4.1

Pendapatan BUMDes Serasan

No	Tahun	Hasil Pendapatan BUMDes Serasan
1	2020	Rp. 10.000.000
2	2021	Rp. 18.000.000
3	2022	Rp. 23.400.000
		Rp. 51.400.000

1. Akuntabilitas Laporan keuangan BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya ?

Akuntabilitas merupakan artinya adalah pertanggungjawaban atau syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.⁷⁶ Dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa

⁷⁶ Hari Susanto, Syaifud Fadhillah, *Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo*, "Jurnal Ilmiah", Vol, 18, No, 1, 2022. h. 8.

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi BUMDes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa informan maka peneliti menganalisis beberapa dimensi yang ada pada BUMDes Desa Tanjung Raya:

a. Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran

Akuntabilitas Hukum Adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di syaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas Kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

dari beberapa peneliti temukan dalam lembaga yang telah dijalankan oleh pengelola BUMDes mereka sudah berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku dan juga mereka menyampaikan kalau dalam pengelolaan BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya selalu berpegang teguh kepada sifat amanah dan jujur

<https://doi.org/10.36841/acton.v18i1.1843>

⁷⁷ Atep Hendang Waluya, *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS Al Baqarah (2) : 282-284*, "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah", Vol, 12, No, 2, 2020. h. 23. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>

baik dalam menjalankan, pelayanan, pelaporan dan juga dalam menjalankan usaha sehingga mereka percaya bahwa setiap perbuatan nantinya pasti akan dipertanggungjawabkan baik dan buruknya.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja (*performance akuntability*) merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan peneliti temukan pengelolaan yang telah dilakukan oleh BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya sudah efektif dan juga efisien dimana bisa dilihat dari karyawan BUMDes Serasan yang selalu melakukan tugas mereka dengan baik dan juga tanpa adanya kecurangan dalam setiap divisi kerjanya masing-masing. Sehingga BUMDes Serasan dapat menambah unit kerja yang ada dalam lembaga mereka. Akan tetapi pihak pengelola masih kurang terbuka dalam setiap transaksi itu semua demi melindungi konsumen mereka.

c. Akuntabilitas Program

Program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus memptanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.

Program-program yang telah dijalankan oleh BUMDes serasan tentunya sudah berdampak bagi masyarakat Desa Tanjung Raya dimana bisa dilihat dari awal berdirinya BUMDes hanya memiliki dua program saja yaitu air bersih dan juga tabung gas kemudian berkembang ke berbagai usaha dari simpan pinjam, mesin giling padi, tenda kursi, dan juga pasar desa. Ini tentunya sudah sesuai dengan visi misi yang telah dijalankan oleh BUMDes Serasan yaitu membantu masyarakat sehingga kedepannya tidak kesulitan lagi.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi di masa depan.

Pihak pengelola BUMDes Serasan selalu mengambil kebijakan yang nantinya tidak merugikan mereka bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi bisa dilihat dari kebijakan usaha yang telah dijalankan yaitu simpan pinjam jika masyarakat belum sanggup untuk membayar maka akan diberikan perpanjangan waktu atau tempo kepada masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari pelaporan keuangannya jika mereka mengalami masalah keuangan atau kesulitan dalam pencatatan pembukuan maka mereka

mengambil kebijakan melalui musyawarah sehingga dapat terselesaikan.

e. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas financial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dan publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Dari hasil peneliti temukan dana yang di cairkan APBDes ke BUMDes setiap tahun selalu ada dan disalurkan kepada pengelola ini telah diisampaikan oleh Bapak Lukman pada hasil wawancara dari dana itu bisa dikembangkan ke berbagai usaha. Juga dalam setiap pencatatan hasil kerja, pengeluaran dan juga pelaporan BUMDes selalu diawasi oleh Dewan pengawas agar dana yang di luncurkan tidak di manfaatkan oleh karyawan yang tidak bertanggungjawab.

2. Transparansi BUMdes pada Desa Tanjung Raya ?

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Public Governance* atau *Good Governance*) dan juga untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan

pemerintahan, organisasi atau perusahaan, maka keadilan (*fairness*) akan dapat ditumbuhkan.⁷⁸

Tingkat transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Desa Tanjung Raya tergolong kurang transparan dimana ini bisa dilihat dari beberapa indikator pertama: keterbukaan informasi keuangan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Desa Tanjung Raya hanya diketahui beberapa kriteria tertentu saja yaitu pengelola dan perangkat desa sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang informasi keuangan BUMDes Serasan. Indikator kedua yaitu ketersediaan informasi. Laporan keuangan BUMDes Desa Tanjung Raya masih sulit untuk di akses oleh masyarakat. Ini karena akses belum ada website resmi pada pihak pengelola BUMDes sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi keuangan, juga spanduk yang ditempelkan hanya ditempatkan pada kantor BUMDes saja sehingga masyarakat yang jauh tidak terlalu berminat untuk datang langsung untuk mengecek informasi. Indikator ketiga yaitu kelengkapan informasi pengelola dan pemerintah desa masih kurang lengkap dan jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang paham tentang informasi keuangan di BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya.

⁷⁸ M.Umar Chapra, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi BUMDes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah, dapat disimpulkan bahwa, pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya berdasarkan beberapa dimensi yaitu: 1. akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas manajerial 3. Aluntabilitas program 3. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas financial, yang telah dibahas bahwa BUMDes desa tanjung raya sudah bergerak dan menjalankan segala macam kegiatan dengan sangat efektif dan efisien dimana dengan adanya BUMDes dapat membantu masyarakat yang ada di Desa Tanjung Raya dan juga dari setiap dana yang masuk dan keluar dari usaha dan juga APBDes nantinya akan di catat dan akan langsung di masukkan kedalam rekening BUMDes Serasan, pencatatan laporan keuangan yang di buat juga sudah dikerjakan oleh orang yang mengetahui atau ahli dalam bidang keuangan itu sendiri dan juga diawasi oleh dewan pengawas dan perangkat desa pada saat proses pencatatan, fungsi dari dewan pengawas dan juga perangkat nantinya akan dapat membantu jika terdapat kesulitan atau kejanggalan yang ada pada laporan keuangan BUMDes Serasan agar nantinya tidak akan ada kecurangan dan data yang di sampaikan dengan sebenarnya.

2. Tingkat transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Desa Tanjung Raya tergolong kurang transparan dimana ini bisa dilihat dari beberapa indikator pertama: keterbukaan informasi keuangan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Desa Tanjung Raya hanya diketahui beberapa kriteria tertentu saja yaitu pengelola dan perangkat desa. Indikator kedua yaitu ketersediaan informasi. Laporan keuangan BUMDes Desa Tanjung Raya masih sulit untuk di akses oleh masyarakat. Indikator ketiga yaitu kelengkapan informasi pengelola dan pemerintah desa masih kurang lengkap dan jelas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka ada beberapa hal yang peneliti berikan sebagai saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Untuk Pihak pengelola BUMDes Serasan Desa Tanjung Raya agar dapat membuat media dan juga mengundang seluruh masyarakat untuk hadir ke musyawarah tahunan nantinya bukan hanya perwakilan supaya masyarakat tau tentang pengelolaan keuangan yang ada pada BUMDes.

- b. Diharapkan agar pelaporan keuangan akan terus membaik kedepannya sehingga pihak pengelola BUMDes harus lebih meningkatkan SDM agar proses pelaporan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Dan kedepannya bisa digantikan dengan orang yang juga paham tentang keuangan itu sendiri.

2. Bagi Kalangan Akademis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sepenuhnya sebagai kajian dan bahan diskusi yang berlandaskan dengan teori-teori yang sudah ada.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menambahkan variabel-variabel lain yang belum ada, sehingga dapat menyempurnakan pemahaman tentang akuntabilitas dan transparansi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmitha. (2020). *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Pamekasan: Graha Ilmu
- Ahmad Mustanir, et al. (2021). *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ahmad Rijali. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, Banjarmasin: Uin Antasari Banjarmasin.
- Aji Dedi Mulawarman. (2023). *Menyibak Akuntansi Syariah Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah*, Malang: Peneleh
- Albi Aggito Dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Beveola Kusumasari, Septiani Dwi Putriani, Enda Layuk. (2015). *"Akuntabilitas" Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Eka Suci Setia Ningrum, Sigit Hermawan, (2017). *"Analisis Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDES dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes"*.
- Herry Kamaroesid. (2016). *"Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes"*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- M. Adrian Muluk, et al. (2022). *Akuntabilitas Pemimpin Kajian Filosofis Dan Empiris Rumah Sakit Islam*, Malang: Peneleh.
- Manggaukang Raba (2020). *"Akuntabilitas Konsep dan Implementasi"*, Malang :UMMPres.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI.
- Mikael Edowai dan Herminawaty Abubakar Miah Said. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dearah*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Nurlena Andalia et al. (2022). *Metodologi Penelitian*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.

Sukarman Syarnubi (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, STAIN Curup: Lembaga Penerbitan Dan Percetakan (LP2).

Umrati Hengki Wijaya. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian*, Sulsel: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary.

Burhan Bungin (2013), *Metode Penelitian sosial dan ekonomi*, (Jakarta: Kencana.

Afrizal (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Burhan Bungin (2013), *Metode Penelitian sosial dan ekonomi*, (Jakarta: Kencana.

Sugiyono (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.)

Jurnal:

Amelia Sri Kusuma. (2014). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, “*Journal Of Rural And Development*”, vol, 5, no. 1. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=qyaPh8oAAAAJ&citation_for_view=qyaPh8oAAAAJ:u-x6o8ySG0Sc

Dedy Aries Poae David P. E. Saerang. (2013). “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud*,” *Jurnal Accountability*, Vol. 2, No. 1. DOI: 10.32400/ja.2340.2.1.2013.27-35

Mega, Kusuma, and Musmini. (2020). “*Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha*”, Vol,11 No, 1. <https://doi.org/10.23887/jap.v11i1.26065>

NandaRisky dan Asim Asyari. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Jaya Tirta* 58, “*Jurnal Riset Akuntansi*”, Vol, 3, No 2, 2022. h. <https://doi.org/10.36733/juara.v12i2.5159>

- Pardi dan Budi Istiyanto. (2020). *“Edunomika” Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Sebagai Penguatan Badan Usaha Milik Desa*, Vol, 04, No, 02.
- Sahrul Hi. Posi, Sang Putu Angga Mahendra Putra. (2021). *“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Bumdes Berdasarkan SAK ETAP,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol, 12, No, 2.
<https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.29591>
- Suci Indah Hanifah. (2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*, *“Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi”*, Vol, 4, No.4.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3584>.
- Zulkarnain Ridlwan. (2013). *“Payung Hukum Pembentukan BUMDes”*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No, 3, 2013.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- Lina Nasehatun Naffidah, Nur Anisa. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang*, *“Jurnal Ilmu Akuntansi”*, Vol, 10, No, 2.
Doi: 10.15408/Akt.V10i2.5936
- Hari Susanto, Syaifud Fadhillah. (2022). *Akuntabilitas Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo*, *“Jurnal Ilmiah”*, Vol, 18, No, 1.
<https://doi.org/10.36841/acton.v18i1.1843>
- Chintia Ayu Tamara. (2016). *Yunus Tete Konde, Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan*, *“Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman”*, Vol, 1, No, 1.
<https://doi.org/10.29264/jiam.v1i1.181>
- Atep Hendang Waluya. (2020). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS Al Baqarah (2) : 282-284*, *“Jurnal Hukum Ekonomi Syariah”*, Vol, 12, No, 2.
<https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3708>
- Kiswanto. (2011). *Analisis Budaya Islam Dan Akuntabilitas*, *“Jurnal Dinamika Akuntansi”*, Vol, 3, No, 2.
<http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>

- Regina Febriani, Enos Paselle, Hariati. (2019). *Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Di Kecamatan Samarinda Ilir Di Kecamatan Samarinda*, "Journal Administrasi Negara", Vol, 7, No, 3.
<https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=9073>
- Kristian Widya Wicaksono. (2021). *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*, "Jurnal Kebijakan Dan Admininstrasi Publik", Vol, 19, No, 1. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Fikri Habibi, Arif Nugroho. (2018). *Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Pandeglang*, "Jurnal Ilmu Administrasi Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi", Vol, 17, No, 2. DOI:10.31113/jia.v15i2.16
- Budiarto. (2020). *Pengujian Struktural Pada Komitmen Manajemen Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, "Jurnal Akuntansi Dan Bisnis", Vol 20, No 1.
DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v20i1.508>
- Dimas Aufa Moerrin, Hero Priono. (2022). *Pengaruh prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pegawai,* "Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan" Vol, 4, No, 11.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Berlian Afriansyah, Meriana, Paddery. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)*, "Jurnal Akuntansi", Vol 8, No, 2.
DOI: <http://dx.doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Dyah Evita Dewi, Priyo Hari Adi, Transparansi. (2019). *Akuntabilitas, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuamgan dana desa (Studi kasus candirejo kecamatan pringapus kabupaten semarang)*, "Jurnal Ilmiah Edounimika", Vol 3, No 2.
DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Daniel Aditya. (2014). *Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru*, "Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan ", Vol, IX, No, 2.
DOI: <https://doi.org/10.15294/dp.v9i2.4886>
- Ristya Dwi Anggraini. (2013). *Transparansi, partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN pacar keling VII*, "Jurnal Ekonomi", Vol, 1, No 2.

- Muhammad Ilham Arisaputra. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia Di Indonesia Yuridika*, “*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*”, Vol,28,No,2.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10171>
- Riki Soleman. (2022). *Transparansi penyaluran dana UMKM bumdes (Analisis Manajemen Syariah)*, “*Jurnal Al Iqtishad*”, vol, 18, No, 2.
 DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v18i2.18163>
- Umi purwanti. (2021). *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Melilian Kecamatan Gekumbang Kabupaten Muara Enim*, “*Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*” Vol. 3, No, 2.
 DOI: <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Aprilia Puspasari. (2019). *Prinsip-Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas*, “*Jurnal Perspektif*”, Vol, 17, No, 2.
 DOI: <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2.6482>
- Diatul Fajri, Rizal Rizal, Nofrivul Nofrivul. (2021). *Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar*,” *Jurnal Akuntansi Syariah*”, Vol, 1, No, 1.
 DOI: <http://dx.doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2733>

Skripsi :

- Arry Eksandi. (2019). *“Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Sosial Reporting Deangan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Moderating Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016”*. Skripsi Tangerang: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Fajrianti Khasanah Putri. (2022). *“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Dalam Persepektif Islam.”* Skripsi Lampung: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nurma Fitriana. (2021). *“Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Rowowrejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Persepektif Good Corporate Governance.”* Skripsi (Metro: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Taufiqul Musyifik Arromzi. (2022). “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batu Putih Laok Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep*”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jember).

Yuni Yuliana Burhan. (2020). “*Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Dana Desa (Pada BUMDes Berkah Pa’lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)*.” Skripsi (Makassar : Fak. Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah).

Internet:

Tafsirq,<https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-70>, diakses 1 juli 2023, pukul 15.00.

Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/12601>, diakses pada 1 juli 2023, pukul 15.30

Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/12601>, diakses pada 1 Juli 2023, pukul 15.30.

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/07/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal 28 Bulan Februari Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Yoga Pranta / 18631115
 Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Pemberdayaan Bumdes berbasis Syariah pada desa Tanjung Proa Kecamatan Semenda Barat Tengah

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : ALGA DERATI

Calon Pembimbing I : Mega Ikhrami Wati MA
 Calon Pembimbing II : Simaeti Auli Silvia ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perbaikan cover, jenis penulisan footnote
2. Pambahasan tidak sesuai dengan para ahli
3. Judul di ganti
4. Aspek garafita tidak boleh sama dengan bagian literatur
5. Penulisan paragraf

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 14 bulan Maret tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Februari 2023

Moderator

Alga Derati

Calon Pembimbing II

Simaeti Auli Silvia

Calon Pembimbing I

Mega Ikhrami Wati

Mega Ikhrami Wati M.A
 NIP. 1984024 201903 2 007

NIP.

Hal ini berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam. Pengawas untuk penulisan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 33/In.34/FS/PP.00.9/05/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penilaian skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penilaian yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Mega Ilhamiwati, MA NIP. 198610242019032007
2. Sineba Arli Silvia, S.E.I., ME. NIP. 2019059105

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : YOGA PRANATA
NIM : 19631115
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Akuntabilitas dan Transparansi BUMdes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 23 Mei 2023

Dekan,



Dr. Yusefi, M.Ag
NIP. 19602021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : YOGA PRANATA
 NIM : 1963115
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : MEGA ILHAMIWATI, MA
 PEMBIMBING II : SINERA ARII SILVIA, S.E.I., ME.
 JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BUMDes
PADA DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN
SEMENDE DARAT TENGAH

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : YOGA PRANATA
 NIM : 1963115
 FAKULTAS/ PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PEMBIMBING I : MEGA ILHAMIWATI, MA
 PEMBIMBING II : SINERA ARII SILVIA, S.E.I., ME.
 JUDUL SKRIPSI : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BUMDes
PADA DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN
SEMENDE DARAT TENGAH

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.


 MEGA ILHAMIWATI, MA
 NIP. 198610242019032007

Pembimbing II.


 SINERA ARII SILVIA, S.E.I., ME.
 NIP. 20140509105



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Konsep judul dan masalah Sistematika penulisan Menyusun referensi	Nys	
2		Tambahkan data (BAB 1) Revisi Teori (BAB 2) Pedoman umum	Nys	
3		Kontribusi pedoman umum	Nys	
4		Cek kembali pedoman umum di dan yg digunakan	Nys	
5		BAB II: Tambahkan data Daftar Ristek	Nys	
6		BAB III: Analisis bahan puncak	Nys	
7		BAB IV: Pertajam analisis BAB V: Susun kembali referensi di BAB IV	Nys	
8		Halaman preface	Nys	
9		ACC	Nys	
10				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	9/05 2023	Perbaiki Judul	Sf	f
2	6/05 2023	ACC BAB 1 Lanjut BAB 2 dan 3	Sf	f
3	26/05 2023	Perhatikan penulisan footnote, Spasi 2	Sf	f
4	26/7 2023	Bab III Perbaiki, lanjut pedoman umum dan corevi	Sf	f
5	5/8 2023	Perhatikan penulisan dan rapikan lagi.	Sf	f
6	8/9 2023	ACC bagian ekripsi	Sf	f
7				
8				
9				
10				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-70030-44 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@aincurup.ac.id

Nomor : Y.II./In.34/FS/PP.00.9/06/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 20 Juni 2023

Kepada Yth.
Pimpinan BUMdes Desa Tanjung Raya
Di-
Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

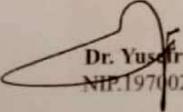
Nama : Yoga Pranata
Nomor Induk Mahasiswa : 19631115
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Akuntabilitas Dan Transparansi BUMDes Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah
Waktu Penelitian : 20 Juni 2023 Sampai Dengan 20 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



Wawancara dengan Ketua BUMDes Serasan



Wawancara dengan Komisaris BUMDes Serasan



Wawancara Dengan Bendahara BUMDes Serasan



Buku tabungan BUMDes Serasan



Sekretariat BUMDes Serasan